

Mendesain Perdamaian Di Tengah Konflik: Imajinasi dan Strategi

oleh Paul Rahmat* - Virginia, USA

Abstraksi

Global peace is an actual issue that is almost relevant to every corner of the world. While conflicts for any reason seem to be unavoidable, many people understand that there are many innocent victims. Many of these victims in fact have nothing to do with the core of the conflict, however, they suffer a lot. Therefore, some significant and crucial steps should be taken in order to promote peace. Using a case of woman movent in Wajir, Kenya, the author proposes that the first step is to realise that there are moral values that could serve as inner power to promote peace. Further steps should be strategically planned according to certain context, such as "what conflict, who are involved, when and where it ocured, and how it would be excuted.

Kata-kata kunci: konflik - perdamaian - harmoni

Manusia dan lingkungan sosial atau masyarakat berhubungan satu sama lain secara dialektik. Dialektika hubungan antara manusia dan masyarakat, demikian Peter Berger, tampak pada kenyataan bahwa manusia membentuk dan mencipta lingkungan sosial atau masyarakat; sebaliknya, masyarakat membentuk dan mencipta manusia. Tidak ada realitas sosial terpisah dari manusia; demikian halnya, manusia tidak dapat eksis kalau terpisah dari lingkungan sosialnya.

Pernyataan bahwa masyarakat adalah produk manusia dan manusia produk masyarakat tidak bertentangan dalam konteks hubungan dialektis tersebut. Seorang tukang bangunan mempunyai kemampuan berdaya cipta untuk membangun rumah. Kemampuan dan keahliannya dalam merancang dan membangun menghasilkan sebuah bangunan atau rumah. Sebaliknya, rumah yang menjadi tempat tinggal manusia berfungsi memberi rasa aman, ketenangan dan turut mendukung suasana keakraban dan kekeluargaan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas relasi manusiawi. Manusia membangun rumah; dan rumah turut membentuk karakter manusia yang berbudaya dan beradab. Dengan demikian, baik manusia maupun masyarakat saling mencipta dan berhubungan satu sama lain secara dialektis.

* Penulis adalah mahasiswa S2 Peace Study di Mennonite Institute, Virginia, USA.

Manusia mempunyai kemampuan untuk merancang atau mendesain sebuah lingkungan sosial yang damai. Manusia adalah arsitek bangunan perdamaian. Pertanyaannya adalah bagaimana manusia mendesain sebuah perdamaian di tengah masyarakat bertikai. Seperti tukang bangunan, seorang arsitek perdamaian membutuhkan sarana, keahlian, pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar membangun dan bahkan imajinasi kreatif untuk merancang dan mendesain perdamaian. Tulisan ini mempunyai asumsi dasar bahwa manusia adalah arsitek perdamaian dan untuk mendesain sebuah perdamaian bagi masyarakat yang bertikai diperlukan sarana membangun perdamaian yakni imajinasi moral dan strategi.

1. Imajinasi Moral: Kapasitas Internal Membangun Perdamaian

Apakah mungkin mencipta atau mendesain perdamaian di tengah masyarakat yang bertikai? Pengalaman empiris menyatakan bahwa upaya damai di tengah masyarakat yang sedang bergejolak adalah sulit, bahkan mustahil. Ini tidak hanya pengalaman komunitas lokal atau nasional seperti Indonesia dalam kasus Aceh atau Papua. Bahkan masyarakat internasional pun baik NGO maupun PBB mengalami banyak kegagalan dan frustrasi dalam upaya membangun perdamaian. Henry Dunant Center gagal memediasi kasus Aceh antara GAM dan Pemerintah NKRI. Pasukan penjaga perdamaian PBB gagal atau lamban mencegah peristiwa genosida di Ruanda sepuluh tahun lalu yang membunuh 800 ribu kelompok yang bertikai antara Tutsi dan Hutu. Namun demikian, kisah pengalaman berikut membuktikan secara empiris bahwa membangun perdamaian adalah sesuatu yang bukan mustahil.

Kisah dari Wajir, Kenya: Kaum Perempuan Pembawa Damai

Distrik Wajir terletak pada bagian utara Kenya, berbatasan dengan Somalia dan Etiopia. Mayoritas penduduk Wajir berasal dari suku Somalia. Seperti daerah-daerah lain di Afrika, penduduk Wajir menderita akibat dampak peperangan antar Somalia dan Etiopia. Ketika pemerintahan Somalia kolaps pada tahun 1989, pertikaian internal menciptakan para pengungsi yang tak terbilang jumlahnya, yang mengalir ke wilayah Kenya. Distrik Wajir mengalami secara langsung dampak dari pertikaian itu. Perdagangan senjata, pertikaian antar kelompok suku, arus pengungsi membuat kehidupan di Wajir menjadi semakin rumit. Pada tahun 1992 pemerintah Kenya menyatakan keadaan darurat bagi Wajir.

Perang antar suku pada tahun 1990-an bukan pengalaman pertama bagi komunitas Wajir. Namun demikian pertikaian itu menjadi suatu lingkaran kekerasan yang melebar dan pengalaman terburuk dalam kehidupan Wajir. Ketika pertikaian dan perang terjadi, muncul beberapa perempuan Wajir yang mengambil inisiatif. Mereka pertama-tama tidak bermaksud untuk menghentikan perang. Mereka cuma menginginkan agar mereka tetap punya akses memperoleh makanan bagi keluarga mereka. Langkah kongkret yang mereka ambil ialah menjaga agar pasar tetap aman bagi setiap orang yang datang untuk menjual atau membeli makanan dan barang kebutuhan sehari-hari.

Dekha, seorang tokoh kunci perempuan Wajir, terkejut ketika suatu malam pada pertengahan tahun 1993 mendegar dentuman senjata dekat rumahnya. Ia lari mencari anaknya yang pertama dan menyembunyikannya beberapa jam di bawah kolong tempur tidur sementara tembak-menembak terjadi di dalam rumahnya. Peristiwa malam itu menjadi *headline news* dan diskusi hangat pada pagi hari berikutnya. Ibu Dekha bercerita kepadanya bahwa pada tahun 1966, ia menyembunyikan Dekha di bawah tempat tidur ketika peperangan terjadi. Pertikaian di Wajir tidak pernah berhenti. Dan kaum ibu sudah capek mencari upaya menghentikan kekerasan di daerah itu. Rupanya Dekha terhenyak oleh cerita sang mama dan mulai berpikir bagaimana mengakhiri segala bentuk kekerasan dan menjadikan Wajir sebuah tempat yang aman di mana putra-putri mereka hidup bebas tanpa perang dan kekerasan. Kisah serupa dialami oleh para perempuan yang lain. Fatuma bercerita bahwa ia dan teman-teman perempuannya merasa cemas ketika menghadiri pesta perkawinan di suatu kampung. Mereka kuatir dan takut karena bagaimana bisa kembali ke rumah dengan selamat dan lebih awal tanpa diganggu dan diperkosa oleh pemuda-pemuda kampung, para bandit bersenjata di tengah jalan.

Sadar akan situasi yang tidak aman dan penuh kekerasan, beberapa perempuan berkumpul, berdiskusi menyatukan pendapat dan mencari jalan untuk berbuat sesuatu. Mereka sepakat untuk mulai di pasar sebagai titik awal dari upaya mencari solusi atas persoalan yang mereka alami. Agenda mereka jelas, bahwa pasar harus aman bagi para perempuan dari suku mana saja yang datang untuk membeli dan menjual. Akses dan keamanan terhadap pasar adalah hak yang harus dilindungi. Ketika kaum perempuan datang mengalir ke pasar, mereka membentuk sebuah kelompok monitor yang memantau segala sesuatu yang terjadi setiap hari di pasar. Mereka membuat laporan tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan seseorang karena masalah klan atau daerah. Bila suatu masalah timbul, satu komite perempuan segera bertindak mencari penyelesaiannya. Dalam waktu yang singkat, kaum perempuan menciptakan

suatu zona damai di pasar. Pertemuan-pertemuan dan prakarsa-prakarsa yang mereka lakukan pada akhirnya menciptakan sebuah asosiasi perempuan Wajir untuk perdamaian.

Sementara mereka bekerja keras di pasar, pertikaian yang sedang bergejolak tetap saja menghantui pikiran dan perasaan mereka. Ketika berkumpul dan berdiskusi mengenai hal itu, mereka memutuskan untuk mengadakan dialog atau sambung rasa dengan para tua-tua dari seluruh klan. Sekalipun mereka punya akses terhadap tua-tua klan, toh tidak semudah yang mereka bayangkan. Perempuan mana yang mau menasihati dan mendesak kita? Pertanyaan atau kecemasan semacam ini sangat beralasan dalam konteks budaya Somalia, Afrika. Mereka harus mempertimbangkan dan memahami system dan hirarki sosial dalam masyarakat Somalia dan mengakui peran kunci para tua-tua klan di Wajir. Dengan menggunakan hubungan dan pendekatan personal dalam kelompok mereka sendiri, mereka berupaya untuk mengumpulkan tua-tua suku dari semua klan dalam sebuah pertemuan akbar. Kaum perempuan tahu posisi mereka dalam masyarakat dan bertindak secara hati-hati untuk tidak memaksa atau mengambil alih pimpinan dalam pertemuan tersebut. Seorang kepala suku dari sebuah klan yang paling kecil dan yang kurang mengalami ancaman kekerasan dari suku-suku setempat dipercayakan menjadi jurubicara pada pertemuan itu. Ia berbicara langsung kepada semua tua-tua suku dan secara retorik minta pertanggungjawaban mereka: Mengapa kita harus bertikai? Siapa yang meraih keuntungan dari pertikaian ini? Keluarga-keluarga kita menjadi rusak dan menanggung akibatnya. Kata-kata ini menusuk hati dan pikiran para tua-tua suku dan menjadi bahan diskusi yang panjang di antara mereka. Beberapa kepala suku yang terlibat dalam perang dan pembunuhan antar klan akhirnya sepakat untuk menghentikan pertikaian. Mereka membentuk sebuah wadah yang disebut Dewan Tua-tua untuk Perdamaian Wajir. Sebagai follow up mereka mengadakan pertemuan rutin dan membentuk subkomisi-subkomisi. Mereka mulai dengan proses melibatkan para pemberontak gerilya di hutan dan membuat deal dengan kelompok-kelompok klan yang bertikai.

Para aktivis perempuan menyadari pentingnya upaya membangun kontak dengan pemerintah setempat dari distrik Wajir dan perwakilan rakyat di parlemen. Didampingi para tua-tua suku, mereka menghadap pemerintah untuk menjelaskan prakarsa dan proses perdamaian yang sedang mereka lakukan. Mereka sering mengundang unsur pemerintah untuk berbagai pertemuan tetapi minta dengan sangat agar pemerintah tidak mengganggu proses yang sedang berlangsung. Mereka mendapat apresiasi yang tinggi dari pemerintah.

Dalam proses membangun perdamaian di Wajir, kaum muda mendapat perhatian utama. Pertanyaan muncul bagaimana melibatkan para pemuda,

khususnya pemuda milisi yang bersembunyi dan bergerilya di hutan. Kaum perempuan dan tua-tua suku menemui tokoh kunci pemuda di distrik dan membentuk sebuah wadah Pemuda untuk Perdamaian. Mereka berupaya tidak hanya masuk ke hutan menjumpai para pemuda milisi yang bergerilya, tetapi mereka datang ke kampung-kampung di seluruh distrik Wajir untuk berbicara dalam forum terbuka dengan ibu-ibu mereka dan pemuda-pemuda setempat. Dalam berbagai seri pertemuan dan diskusi, mereka akhirnya menyadari bahwa keprihatinan utama adalah pengangguran. Senjata, pertikaian dan mencuri memberikan keuntungan secara ekonomis. Jika para pemuda milisi itu berhenti bertikai, menyerahkan senjata dan meninggalkan hutan, mereka membutuhkan sesuatu sebagai pengganti untuk memperoleh penghasilan ekonomi. Karena itu komunitas pebisnis setempat dilibatkan. Prakarsa-prakarsa untuk pembangunan kembali dilakukan dan lapangan pekerjaan baru ditawarkan. Baik kaum perempuan, tua-tua suku, kelompok pemuda untuk perdamaian, kaum pebisnis dan para ulama setempat bersama-sama membentuk sebuah komite perdamaian dan pembangunan Wajir.

Melalui upaya keras para tua-tua suku, pertikaian antar klan dapat dihentikan. Sebuah komisi dibentuk untuk mengverifikasi dan membantu proses perlucutan senjata kelompok-kelompok klan yang bertikai. Sebuah proses pengembalian senjata kepada pihak yang berwenang dikoordinir oleh komisi Tua-tua Suku dan polisi. Sementara itu Komite Perdamaian dan Pembangunan Wajir menyelenggarakan pertemuan rutin dengan pemerintah distrik dan nasional. Mereka berusaha mencegah eskalasi konflik internal dan melindungi warga kampung dari pengaruh konflik eksternal dengan melibatkan warga setempat. Para milisi pejuang kembali ke komunitas mereka dan menyerahkan senjata kepada komisi tua-tua Suku. Kemudian mereka melibatkan diri dalam gerakan perdamaian Wajir. Mereka membantu proses pelucutan senjata di antara para kelompok yang bertikai.

Sepuluh tahun kemudian, distrik Wajir tetap menghadapi persoalan-persoalan serius. Komite perdamaian dan pembangunan Wajir tetap bekerja secara aktif untuk perdamaian. Mereka melakukan inisiatif-inisiatif baru termasuk mengadakan pelatihan para polisi dan membuat program pendidikan di sekolah-sekolah setempat. Mereka membentuk sebuah network pendidikan damai yang melibatkan para mediator dan guru-guru yang pernah mengikuti pelatihan resolusi konflik.

Kemiskinan dan pengangguran tetap saja menjadi sebuah tantangan berat bagi distrik Wajir. Senjata masih beredar di seluruh wilayah itu. Pertikaian belum berhenti di Somalia yang dampaknya dirasakan secara langsung di Wajir. Namun

mereka yang terlibat dalam komite perdamaian dan pembangunan Wajir tetap bekerja keras meneruskan tugas-tugas mereka. Para tua-tua suku bertemu secara rutin pada tingkat basis. Kerja sama yang lebih erat antar kampung, klan dan pemeritahan setempat semakin giat diupayakan. Dan para perempuan yang berinisiatip menghentikan perang kini dapat menikmati suasana pasar yang aman dan damai. Dari kisah tentang keberhasilan; kaum perempuan Wajir memutuskan lingkaran kekerasan dan konflik di Wajir timbul pertanyaan: mengapa kaum perempuan Wajir yang sehari-hari bekerja di pasar dan tidak pernah mengalami pendidikan dan pelatihan khusus tentang resolusi atau transformasi konflik dan juga tidak pernah didampingi oleh para NGO nasional dan internasional yang profesional dan para pakar perancang perdamaian dapat menghembus angin segar perdamaian di Wajir? Bukan pemimpin politik baik lokal maupun nasional, bukan pula karena tekanan komunitas internasional yang membawa perubahan sosial di Wajir. Bukan karena pengaruh tradisi religius atau peran para ulama; juga bukan pengaruh tekanan penguasa politik, ekonomi, atau militer. Kalau demikian, apa yang menyebabkan terjadi suatu titik balik perubahan sosial yang signifikan di Wajir? Hal ini dapat terjadi karena mereka mempunyai kemampuan yang disebut oleh John Paul Lederach sebagai imajinasi moral dalam relasi manusiawi. Imajinasi moral adalah sebuah kapasitas untuk mengimajinasi sesuatu berdasarkan tantangan-tantangan real sehari-hari yang pada akhirnya mampu melahirkan atau menciptakan sesuatu yang belum pernah terjadi. Dalam konteks membangun perdamaian, imajinasi moral diartikan sebagai kemampuan berimajinasi dan melahirkan tanggapan-tanggapan dan prakarsa-prakarsa konstruktif berbasis pada realitas tantangan kekerasan dalam kehidupan sehari-hari lalu mengtransendensi dan meretas rantai dari pola-pola dan lingkaran-lingkaran destruktif.

Banyak kisah serupa dengan pengalaman kaum perempuan Wajir yang menunjukkan bahwa imajinasi moral sebagai suatu kekuatan yang mengubah realitas kekerasan menuju perdamaian seperti komunitas *compesinos* (petani miskin) di Kolumbia, para pemuda Kokombas yang menantang para tua-tua suku Dagombas di Ghana, komunitas Kristen St. Egidio yang bekerja sebagai relawan kemanusiaan (*volunteers*) di Mozambiq atau para professor atheis yang hanya berdiskusi tentang filsafat dengan panglima perang di Takijistan. Imajinasi moral adalah roh, semangat yang menjiwai orang-orang atau komunitas setempat memberikan tanggapan-tanggapan kreatif terhadap tantangan kekerasan yang mereka alami dan tanggapan-tanggapan konstruktif itu pada akhirnya menciptakan relasi manusiawi yang dapat mengubah realitas kekerasan menjadi sebuah mata air perdamaian yang menyejukan.

2. Strategi : Kapasitas Eksternal Mendesain Perdamaian

Mendesain perdamaian di tengah masyarakat yang berkonflik membutuhkan strategi. Kalau imajinasi moral merupakan suatu kapasitas yang timbul secara intuitif dalam situasi krisis, merancang upaya perdamaian memerlukan perencanaan yang strategis. Ibarat menanam benih dari sebuah pohon. Sebuah benih mengandung potensi kehidupan. Namun benih itu perlu ditanam pada tanah agar bertumbuh menjadi pohon yang besar dan pada waktunya menghasilkan buah. Untuk menanam benih dibutuhkan perencanaan dan strategi: kapan, di mana dan bagaimana benih itu ditanam. Secara analogis dapat dikatakan benih adalah imajinasi moral dan menanam benih adalah strategi. Menanam benih-benih perdamaian menuntut suatu strategi. Strategi itu termasuk membuat keputusan tentang apa yang kita perlukan untuk membuat mimpi tentang damai menjadi sebuah kenyataan. Dan kapan, di mana, bagaimana penanaman benih-benih itu dapat dilakukan. John Paul Lederach mengajukan sebuah kerangka (*framework*) membangun perdamaian dengan membuat keputusan strategis tentang apa, siapa, kapan, di mana dan bagaimana mendesain perdamaian. Berikut ini dikemukakan berbagai macam perangkat atau alat yang dapat digunakan untuk membantu para arsitek perdamaian menentukan dan mengambil keputusan-keputusan strategis dan langkah-langkah taktis guna merancang perdamaian dalam situasi konflik.

2.1. Strategi 'APA'.

Bagaimana para arsitek perdamaian menentukan apa yang harus dilakukan? Berbagai macam perangkat analitis sangat membantu untuk mendesain ikhtiar-ikhtiar perdamaian berdasarkan pada sumber-sumber daya, kebutuhan-kebutuhan dan isu-isu strategis yang menarik perhatian publik dan mengundang respons banyak orang.

Berfokus pada kapasitas lokal mengupayakan damai dengan berfokus pada sumber-sumber atau kapasitas lokal merupakan langkah awal yang penting. Hanya orang-orang atau komunitas lokal berkemampuan membuat peta perdamaian bagi masa depan mereka. Ini dapat dilakukan melalui dua cara pendekatan. Pertama, melalui identifikasi kekuatan atau sumber-sumber daya setempat. Sangat penting mengidentifikasi kekuatan-kekuatan seperti orang-orang, program, sistem, simbol, perilaku orang-orang dan tradisi setempat yang menghubungkan orang-orang dan menciptakan relasi berkelanjutan yang mendukung perdamaian. Mendesain perdamaian dengan berfokus pada kapasitas lokal bertujuan membangun dan meningkatkan kualitas dari apa yang sedang

bekerja dan mengurangi atau memperkecil kemungkinan akan gagal dari upaya-upaya damai yang dilakukan dari luar. Budaya lokal dilihat sebagai aset untuk membangun perdamaian. Para arsitek perdamaian baik kelompok insider maupun outsider ditantang secara serius untuk belajar tentang dan menjadi lebih responsif terhadap budaya setempat.

Pendekatan kedua dikenal dengan apa yang disebut apresiasi atau pemindaian pada aset. Metode apresiasif dan pemindaian berdasarkan pada apa yang sedang terjadi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci untuk membantu orang-orang berpikir tentang situasi yang sedang mereka alami. Daripada berfokus pada masalah, pendekatan apresiatif membantu orang-orang menemukan kekuatan-kekuatan yang perlu diupayakan dan dikukung melalui program intervensi membangun perdamaian. Para aktivis perdamaian menggunakan metode interview tanpa mengancam dan melakukan proses dialog untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang setempat mengungkapkan pandangan-pandangan mereka dan menemukan solusi-solusi terhadap isu-isu krusial di dalam komunitas mereka.

Pemindaian kebutuhan kekerasan dan konflik berkaitan dengan kebutuhan dan hak baik pribadi maupun kolektif. Konflik terjadi ketika orang merasa bahwa kebutuhan mereka tidak terpenuhi karena dihalangi atau diambil oleh orang lain. Kekerasan timbul apabila orang menggunakan cara yang merusak atau merugikan relasi manusiawi dengan menolak atau menghalangi kebutuhan orang lain.

Membuat analisis tentang kebutuhan membantu komunitas mendiskusikan kebutuhan mereka sambil memperhatikan berbagai macam opsi tentang pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu. Pemindaian akan kebutuhan dapat membantu komunitas menentukan peran di mana mereka perlu membangun kapasitas mereka sendiri dan bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu.

Faktor penyatu dan pemisah setiap komunitas mempunyai seperangkat system, lembaga, perilaku, nilai, simbol dan upacara yang menghubungkan/menyatukan atau memisahkan orang satu dengan yang lain. Faktor penghubung seperti musik dan bahasa bertidak sebagai penyatu antara orang-orang dalam situasi konflik. Sebaliknya provokasi untuk berperang, prasangka dan sikap *stereotype* tentang orang atau suku tertentu menjadi pemicu yang dapat merusak relasi dan memecah belah keharmonisan dalam komunitas. Membangun perdamaian harus mempertimbangkan faktor-faktor penghubung yang mendukung upaya-upaya perdamaian dan mencegah atau menghentikan hal-hal yang menyebabkan perpecahan dan pemisahan.

Mengemas isu-isu strategis membangun perdamaian menuntut pilihan-pilihan strategis tentang bagaimana mengemas isu-isu yang menarik perhatian publik dan menggerakkan mereka untuk bertindak. Isu-isu penting dan kompleks perlu dikemas dan dirumuskan secara sederhana dalam bahasa atau term-term, metafora dan konsep-konsep yang mudah ditangkap dan dimaknai oleh publik. Gandhi, misalnya, yang melawan kebijakan penguasa kolonial Inggris dan memperjuangkan Kemerdekaan India, mengemas sejumlah isu yang lebih kecil dengan mengatakan bahwa orang India mempunyai hak untuk membuat garam sendiri dan memakai pakaian tradisional India. Bagi banyak orang, berbicara tentang damai dan rekonsiliasi memperlihatkan tanda-tanda kompromi pada satu sisi dan sekaligus menjual isu-isu strategis pada sisi yang lain. Menemukan sebuah kerangka terbaik atau pintu masuk yang tepat untuk membicarakan isu-isu strategis mempunyai dampak yang signifikan yang menggugah perhatian dan minat orang-orang memberikan respons terhadap isu-isu tersebut.

Gagasan tentang mengemas isu-isu strategis berkaitan dengan konsep yang disebut John oleh Paul Laderach sebagai *presenting situation*, di mana suatu peristiwa konflik atau aspek-aspek tertentu dari situasi konflik dapat menggugah dan mengundang perhatian publik secara luas. *Presenting situation* atau semacam *breaking news*, misalnya kasus pemerkosaan pada suatu kampung, membuat orang menjadi sadar akan masalah yang sedang terjadi. Itu menjadi titik tolak (pintu masuk) untuk berbicara tentang masalah-masalah yang barangkali mempunyai akar yang lebih dalam dan sejarah yang panjang, misalnya bagaimana pandangan orang-orang setempat tentang peran perempuan, seks dan gender, atau gambaran media tentang perempuan dan perilaku seksual dalam masyarakat.

Persuasif dan koersif

Proses membangun perdamaian dapat menggunakan pendekatan persuasif atau koersif (pemaksaan) untuk membuat perubahan. Membuat keputusan entah menggunakan cara persuasif, koersif atau kedua-duanya dalam strategi membangun perdamaian menuntut suatu analisis situasi secara hati-hati dan akurat.

Pendekatan persuasif mengajak orang untuk berubah dengan cara meyakinkan mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui refleksi pribadi, membangun relasi dan berbagi pengalaman dan curah gagasan. Apabila orang secara sukarela memilih untuk mengubah cara berpikir dan perilaku sebagai dampak dari proses belajar melalui negosiasi atau dialog, mereka akan merasa lebih nyaman dengan

perubahan itu dan perubahan dalam perilaku mereka akan bertahan lebih langgeng.

Akan tetapi pendekatan persuasif tidak selalu berhasil atau bekerja secara memuaskan. Martin Luther King, Jr. pernah mengatakan: Kebebasan tidak selalu diberikan secara cuma-cuma oleh para penindas; kebebasan harus dituntut secara paksa oleh kaum tertindas. Pemaksaan mendesak orang untuk berubah dengan membuat mereka terluka melalui tindakan isolasi, tekanan atau bahkan paksaan secara sosial, psikologis, ekonomis dan fisik. Sementara kekerasan itu sendiri adalah sebuah pemaksaan, maka tindakan non-violence (pantang kekerasan) merupakan sarana yang memaksa orang untuk berubah. Strategi membangun perdamaian melalui pendekatan koersif termasuk, antara lain para pembela HAM yang menelanjangi dan membuat rasa malu para penindas HAM melalui sanksi ekonomi atau boikot, ekspos pada media nasional dan internasional atau kelompok-kelompok sipil pegiat perdamaian berupaya memaksa kelompok-kelompok yang sedang bertikai untuk menghentikan kekerasan. Namun pendekatan koersif itu sendiri tidak memecahkan masalah atau membawa perdamaian secara berkelanjutan, dan bahkan beberapa strategi pemaksaan menjadi kontra produktif. Penerapan pendekatan koersif dan persuasif menuntut suatu penilaian yang saksama dan penentuan waktu yang tepat.

Berbagai level perubahan relasi, John Paul Lederach mengemukakan bahwa membangun perdamaian mengandaikan perubahan relasi pada empat level: personal, relasional, kultural dan struktural.

- + Perubahan pada tingkat personal meliputi perubahan sikap dan perilaku yang baru dari individu-individu.
- + Perubahan pada tingkat relasional termasuk relasi baru atau relasi yang dipulihkan dan diperbaharui antara kelompok yang bertikai.
- + Perubahan secara kultural termasuk nilai-nilai yang mendukung atau memperkuat perdamaian.
- + Perubahan struktural termasuk institusi-institusi baru, kebijakan-kebijakan dan atau pemimpin-pemimpin baru.

Setiap program atau aktivitas membangun perdamaian tidak selalu menyentuh atau berkaitan dengan semua level. Namun demikian, sebuah program membangun perdamaian yang terorganisir secara komprehensif mestinya menyangkut semua level melalui berbagai macam program. Misalnya, di Ruanda beberapa kelompok mengfokuskan kegiatan mereka pada trauma healing secara individual dan program yang bertujuan membantu orang merefleksikan sikap-sikap mereka sendiri. Sementara kelompok yang lain mengembangkan pro-

gram-program dialog untuk membangun relasi antar kelompok pada tingkat komunitas. Organisasi-organisasi internasional berkonsentrasi pada perubahan cultural melalui program sandiwara radio yang menekankan nilai-nilai damai dan ketrampilan. Perserikatan Bangsa-bangsa dan Organisasi Uni Afrika bekerja pada level perubahan struktural untuk menciptakan sejumlah pemimpin-pemimpin baru yang mampu bekerja sama antar etnis dan multi-etnis. Beberapa pengalaman empiris menunjukkan bahwa program-program yang bertujuan untuk perubahan pada tingkat individu memberikan sumbangan pada pembangunan perdamaian secara berkesinambungan hanya jika mereka secara eksplisit dihubungkan dengan program-program yang bertujuan untuk perubahan struktural.

2.2. Strategi 'SIAPA'.

Membangun perdamaian merupakan tugas setiap orang. Menentukan siapa yang terlibat dalam membangun proses perdamaian menuntut lebih banyak strategi dalam mengambil keputusan. Diplomasi pelbagai jurus pemerintah bertanggungjawab untuk menjamin keamanan dan ketentraman para warga negara. Akan tetapi tidak hanya pemerintah yang bertanggungjawab atau mampu menciptakan perdamaian. Keterlibatan dan sumbangan para warga sipil baik pribadi maupun organisasi-organisasi swadaya masyarakat (NGO) yang kredibel sangat penting. Upaya-upaya kelompok NGO dan masyarakat sipil dalam membangun perdamaian dikenal dengan istilah diplomasi jurus kedua (*track II diplomacy*) yang menjadi partner dari diplomasi jurus pertama (*track I diplomacy*) yang dilakukan para diplomat Negara.

Konsep tentang diplomasi pelbagai jurus (*multi-track diplomacy*) mengakui keanekaragaman aktor atau diplomat jurus kedua antara lain media massa, para professional resolusi konflik, pebisnis, organisasi keagamaan dan para ulama, aktivis, peneliti, pendidik, kaum perempuan, para pemuda dan struktur-struktur kepemimpinan tradisional. Para pemimpin tradisional seperti para sesepuh, kepala suku atau raja/ratu masih tetap eksis pada banyak daerah di dunia termasuk Indonesia. Mereka memiliki sejumlah kekayaan atau aset budaya seperti upacara-upacara tradisional, ritus-ritus dan kebiasaan-kebiasaan lokal untuk membangun atau memulihkan perdamaian di dalam komunitas mereka. Pada banyak tempat di Indonesia, terutama kampung-kampung tradisional, peranan sesepuh, kepala suku dan raja-raja setempat tidak bisa diabaikan dalam proses menciptakan perdamaian antara berbagai kelompok etnis. Peranan kepala suku dalam masyarakat Dayak atau Papua, para ulama di Aceh, relasi *dahlian na tolu* (segi tiga pilar) dalam masyarakat Batak Tapanuli, para pastor dan suster di NTT sangat vital. Masyarakat setempat sangat respek terhadap autoritas

lokal tersebut yang mempunyai legitimasi moral. Mengakui berbagai macam pelaku atau pegiat perdamaian mengandaikan perlunya koordinasi dan kolaborasi antar pelbagai jurus.

Orang-orang kunci dan masa yang kritis strategi siapa membangun perdamaian menuntut perlunya menentukan aktor-aktor mana yang dapat membawa perubahan secara signifikan. Hal ini membutuhkan sebuah analisis tentang orang-orang atau kelompok yang memiliki pengaruh atau posisi tawar yang kuat dalam mengambil keputusan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin kunci yang mampu membentuk opini publik.

Peran para pemimpin kunci sangat penting dalam membangun perdamaian. Mengakui peranan sentral para pemimpin atau tokoh-tokoh kunci dapat dipahami dalam dua hal. Pertama, mereka memiliki wewenang dan kesempatan membuat keputusan-keputusan penting yang dapat mengurangi kekerasan dan memenuhi kebutuhan dasar warga. Kedua, mereka menggunakan pengaruh mereka untuk menciptakan masa yang kritis di mana banyak orang tertarik dengan gagasan dan solusi yang mereka tawarkan sehingga perubahan dapat terjadi. Selain itu media dan pendidikan sangat membantu untuk menciptakan suatu massa yang kritis yang mempunyai komitmen terhadap perdamaian. Bekerja secara simultan pada berbagai level para pegiat perdamaian bekerja pada berbagai level masyarakat. John Paul Lederach menggunakan ilustrasi sebuah piramide untuk menggambarkan berbagai level yang bekerja untuk membangun perdamaian.

Pada setiap tingkat dari piramide tersebut ada sejumlah orang yang mampu memberi inspirasi dan memimpin upaya-upaya mencapai perubahan sosial. Pada level puncak, PBB, pemeritahan nasional, intitusi keagamaan internasional berpartisipasi dalam proses dialog, negosiasi dan mediasi terhadap konflik seperti krisis politik. Pada level tengah, para pemimpin organisasi-organisasi nasional dan regional serta pebisnis membuat kebijakan dan melakukan program-program inisiatif seperti melakukan koordinasi regional untuk bantuan krisis kemanusiaan. Pada tingkat akar rumput atau level komunitas, berbagai macam kelompok melaksanakan program bantuan dan pengembangan, penjagaan perdamaian oleh warga sipil, dialog, pelatihan trauma healing dan berbagai macam proyek yang lain. Setiap level bekerja secara simultan dan saling melengkapi.

Dalam kasus krisis kemanusiaan di Sudan pada tahun 2004, misalnya, banyak aktor yang terlibat pada berbagai level. Upaya-upaya membangun pedamaian pada level atas termasuk permintaan personal dari sekjend PBB, Kofi Anan, terhadap pemerintah Sudan untuk mengakui bahaya kekurangan makanan secara meluas. Pada level tengah, kelompok-kelompok NGO seperti Palang Merah Internasional dan Oxfam memobilisasi sumber-sumber

internasional dan regional dan mengkoordinir upaya-upaya bantuan kemanusiaan. Sementara pada tingkat akar rumput, NGO dan gereja-gereja bekerja sama mendistribusikan bantuan dan menyediakan barak-barak dan makanan bagi para pengungsi.

Kelompok moderat dan ekstremis membangun perdamaian mendesak perlunya mengayomi semua kelompok baik yang moderat maupun ekstremis. Kedua pemimpin, baik dari kelompok yang melakukan kekerasan maupun mereka yang siap mendukung perdamaian harus dilibatkan dalam proses perdamaian. Ada banyak program dalam upaya membangun perdamaian yang hanya melibatkan orang-orang yang pro-perdamaian. Pemimpin-pemimpin yang pro-vilonece sering diabaikan karena mereka dianggap sebagai penghalang atau perusak yang dapat mengganjal, membelokkan dan bahkan menolak proses perdamaian. Jika kelompok ekstremis ini tidak dilibatkan, program membangun perdamaian memiliki kemungkinan kecil untuk berhasil.

Kelompok *insider* dan *outsider* Dalam banyak kasus konflik dan kekerasan, baik kelompok orang dalam (*insider*) maupun orang luar (*outsider*) bekerja untuk perdamaian. Mereka terlibat dan berpartisipasi dalam berbagai cara yang berbeda. Kelompok insider adalah mereka yang tinggal dalam komunitas yang berkonflik. Mereka pada umumnya membuat komitmen jangka panjang untuk bekerja dan mempertaruhkan banyak hal - kalau tidak mau dikatakan segalanya - entah upaya perdamaian itu berhasil atau gagal. Mereka mempunyai pemahaman yang lebih dalam tentang budaya setempat, konteks masalah, konflik dan sumber-sumber lokal yang mendukung upaya-upaya perdamaian. Mereka memiliki jaringan relasi yang luas dan lebih mengandalkan kredibilitas pada orang-orang setempat.

Kelompok *outsider* adalah orang-orang dan organisasi-organisasi yang secara khusus datang ke daerah konflik untuk berpartisipasi membangun perdamaian. Mereka memiliki banyak aset ekonomi dan politik. Aset yang mereka miliki memudahkan mereka untuk membangun kesadaran internasional tentang konflik dan bagaimana para partisipan lokal bekerja untuk perdamaian. Kelompok outsider dapat membantu untuk mempengaruhi para pemimpin nasional dan internasional untuk menangani konflik dan menemukan para sponsor yang rela memberikan bantuan finansial. Selain itu, kelompok outsider dapat meningkatkan keamanan dan memberikan dorongan politis bagi kelompok insider melakukan pekerjaan mereka dengan cara melakukan pendampingan secara fisik sehingga kemungkinan serangan atau tindakan pembalasan antar kelompok yang bertikai dapat dicegah. Mereka juga dapat menciptakan ruang bagi dan mendukung upaya-upaya atau program transformasi konflik, keadilan restoratif dan trauma healing.

2.3. Strategi 'KAPAN'.

Konflik bersifat dinamis, selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu dan bergerak dalam gelombang dan lingkaran temporal. Membangun perdamaian berupaya mencegah dan menangani kekerasan/konflik. Upaya membangun perdamaian dilakukan baik sebelum terjadinya konflik atau kekerasan (*pre-violence*), selama maupun sesudah konflik (*post-violence*). Skema atau langkah-langkah praktis berikut ini memperlihatkan strategi membangun perdamaian yang mengandaikan berbagai macam tindakan pada setiap periode dari tiga kerangka waktu tersebut.

Sebelum kekerasan/konflik terjadi. Sebelum konflik terjadi, bentuk-bentuk struktural dari konflik sudah ada. Dalam sebuah komunitas, satu, dua kelompok atau bahkan lebih merasa tidak adil atau tidak fair tentang pendistribusian sumber-sumber hidup atau tindakan kekerasan terhadap hak-hak asasi manusia. Program pembangunan perdamaian secara preventif melakukan intervensi sebelum terjadinya kekerasan masal atau konflik terbuka. Peringatan awal (*early warning*) dan proyek-proyek responsif terhadap potensi konflik bertujuan untuk memantau konflik pada stadium awal dan mengirimkan alarm kepada komunitas-komunitas internasional, pemerintah nasional, dan NGO-NGO sebelum kekerasan itu terjadi. Melalui tindakan advokasi dan berbagai macam aksi strategis lain, para aktivis non-violence dapat memerangi konflik dengan cara menarik minat dan menggugah perhatian secara nasional dan internasional tentang isu-isu penting dan kebutuhan-kebutuhan akan perubahan struktural. Para pemimpin internasional, nasional dan komunitas lokal dapat bekerja sama mengungkapkan dan menangani isu-isu tersebut secara demokratis, meyakinkan orang-orang bahwa negosiasi, dan bukan kekerasan, merupakan cara dan sarana terbaik untuk mengatasi konflik.

Selama kekerasan/konflik berlangsung. Selama kekerasan berlangsung program membangun perdamaian ditujukan baik terhadap para korban maupun pelaku kekerasan. Lembaga bantuan internasional dan lokal perlu memberi perlindungan dan menjamin keamanan para pengungsi dan korban kekerasan. Kelompok pelaku kekerasan perlu dihentikan oleh pasukan penjaga perdamaian atau polisi dan mengendalikan situasi dari kemungkinan tindakan kekerasan yang lebih besar. Para pemimpin pada semua tingkat perlu segera menciptakan kesempatan-kesempatan kepada orang-orang untuk membangun relasi yang melampaui dan dalam garis konflik dan sasarannya ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar untuk semua kelompok yang bertikai. Mereka harus bekerja untuk mencapai solusi-solusi yang saling memuaskan terhadap persoalan-persoalan mendesak. Jika kekerasan terus berlanjut sampai beberapa

bulan atau tahun, maka program-program membangun perdamaian jangka panjang perlu dilakukan misalnya membuat pelatihan tentang HAM, transformasi konflik, keadilan restoratif, trauma healing, dan sebagainya.

Sesudah kekerasan/konflik terjadi. Sesudah perang atau konflik, pelucutan senjata-senjata yang dimiliki warga sipil perlu dilakukan dan mengendalikan orang-orang atau kelompok bersenjata serta membangun kembali infrastruktur. Program-program pembangunan kapasitas seperti pelatihan dan pendidikan, pembangunan/pengembangan, konversi militer, riset dan evaluasi dapat membantu mengembangkan pendidikan perdamaian dan hak asasi manusia secara berkelanjutan, menciptakan kesempatan-kesempatan untuk pembangunan sosial ekonomi dan membuka saluran dana untuk riset dan pengembangan guna menciptakan struktur-struktur demokratis berbasis pada budaya setempat.

Evaluasi kematangan konflik kapan sebuah intervensi terhadap kekerasan atau konflik dapat dilakukan? Mengetahui saat yang tepat untuk melakukan sebuah intervensi terhadap kekerasan memerlukan suatu analisis tentang bagaimana orang-orang menjadi sadar akan isu-isu dan seberapa besar kekuatan yang dimiliki setiap kelompok berkaitan atau dibandingkan dengan kelompok yang lain. Negosiasi tidak selalu mungkin terjadi. Kadang-kadang kelompok-kelompok penguasa menolak untuk bernegosiasi dengan kelompok yang lain. Gerakan damai para mahasiswa Indonesia dalam menggulingkan regim represif Suharto pada tahun 1998 merupakan saat yang tepat dan titik kulminasi dari proses pematangan pemikiran dan kesadaran demokratis untuk melakukan sebuah perubahan rezim yang dimulai sejak satu atau dua dekade sebelumnya. Barangkali peristiwa Malari tahun 1975 merupakan titik awal dari gerakan dan kesadaran itu. Lisa Sirch memberikan gambaran kapan sebuah konflik menjadi matang untuk melakukan intervensi.

Para aktivis menggunakan sebuah strategi yang merupakan campuran antara pendekatan koersif dan persuasif untuk memerangi/mengatasi konflik secara *non-violence*. Jika strategi ini bekerja dengan baik, maka kekuasaan menjadi lebih seimbang, kesadaran orang-orang terhadap isu-isu strategis meningkat, akar-akar konflik dan kekerasan diangkat kepermukaan kesadaran sebagai bentuk membangun relasi melalui dialog, negosiasi dan mediasi.

Tanggal simbolis saat atau tanggal tertentu mempunyai arti simbolis. Ketika mengadakan suatu launching untuk memulai suatu program membangun perdamaian, penandatanganan sebuah perjanjian damai atau saat kedatangan pasukan penjaga keamanan dapat dijadikan sebagai tanggal atau waktu simbolis. Kelompok-kelompok pegiat HAM menggunakan simbolisme 21 Maret 1960, saat terjadinya peristiwa masaker yang mengerikan di Afrika Selatan sebagai

Hari International untuk eliminasi rasisme. Apakah 30 September 1965 yang diindoktrinasi oleh ideologi rezim Orba sebagai hari kesaktian Pancasila, dapat menjadi tanggal simbolis nasional untuk peringatan menentang kejahatan kemanusiaan dan genosida di Indonesia?

2.4. Strategi 'DI MANA'.

Strategi membangun perdamaian juga memerlukan suatu analisis tentang tempat dan ruang yang mempunyai arti simbolis dan penting secara sosial yang dapat meningkatkan kualitas relasi. Jika sebuah program membangun perdamaian tertuju atau mempunyai sasaran pada kaum muda, maka tempat-tempat seperti sekolah, lapangan bolakaki, arena permainan dapat menjadi tempat penting dan strategis untuk melakukan intervensi. Para perempuan kiranya lebih suka dimobilisasi ke tempat-tempat di mana mereka sering bertemu dengan sesama kaum perempuan yang lain. Pada banyak tempat dan budaya, kaum perempuan lebih suka memilih pasar sebagai tempat pertemuan dan titik start untuk melakukan aksi protes yang signifikan. Apakah mesjid, gereja, pura atau candi dapat berfungsi sebagai simbolisme zona damai?

Para mediator Norwegia membawa para negosiator Israel dan Palestina ke vila-vila di daerah pedesaan di mana mereka saling membagi makanan ala kekeluargaan dan berjalan bersama-sama di hutan mencari kayu api. Menciptakan sebuah latar simbolis yang mendorong para negosiator menemukan titik-titik kesamaan dalam kemanusiaan mereka merupakan suatu unsur yang penting dalam mengupayakan diplomasi pada semua level.

2.5. Strategi 'BAGAIMANA'.

Bagaimana strategi membangun perdamaian dapat dilakukan? Apa yang menjadi prinsip-prinsip dasar yang harus dipertimbangkan? Apa yang dibutuhkan untuk mengkoordinasi semua aktor dan berbagai aktivitas membangun perdamaian? Prinsip-prinsip berikut menganjurkan langkah-langkah atau tugas-tugas utama dalam merancang sebuah strategi membangun perdamaian.

- 1) Refleksi tentang nilai-nilai. Membangun perdamaian memerlukan refleksi personal dan organisasional secara berkelanjutan, mengklarifikasi nilai-nilai dan evaluasi tentang bagaimana program-program membangun perdamaian dapat memenuhi nilai-nilai tersebut.
- 2) Analisa tentang konflik dan kekerasan. Membangun perdamaian membutuhkan analisis yang terus menerus tentang sumber-sumber daya yang

- diperlukan untuk perdamaian dan membuat analisis tentang sebab-sebab serta dinamika konflik dan kekerasan.
- 3) Sasaran pada kebutuhan dan hak-hak. Membangun perdamaian membantu orang-orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dan hak-hak mereka sambil mengakui kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak orang lain.
 - 4) Perencanaan jangka panjang. Membangun perdamaian bergerak dari kegiatan atau program jangka pendek, melewati situasi krisis orientasi, menuju perubahan sosial yang menentukan dalam kurun waktu yang panjang, selama beberapa tahun bahkan dekade.
 - 5) Transformasi seluruh system. Membangun perdamaian termasuk perubahan pada tingkat personal, relasional, budaya dan struktur.
 - 6) Mengkoordinasi semua pendekatan dan aktor. Membangun perdamaian membutuhkan pendekatan-pendekatan yang terkoordinir yang mengandai-kan tanggungjawab, rasa memiliki, akuntabilitas dan partisipasi dari berbagai penggiat perdamaian.
 - 7) Mengidentifikasi dan menciptakan kekuasaan. Kekuasaan ada pada semua tingkat relasi. Membangun perdamaian mendesak semua orang untuk menyadari kekuasaan mereka dan menggunakan kekuasaan itu tanpa kekerasan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusiawi mereka sambil menghormati kebutuhan-kebutuhan orang lain.
 - 8) Pemberdayaan manusia. Membangun perdamaian memperkuat dan meningkatkan upaya-upaya lokal dan memberdayakan sumber-sumber daya manusiawi (*human resource*) untuk bertindak. Membangun perdamaian didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi dan penentuan diri sendiri.
 - 9) Memahami dan menghargai budaya setempat sebagai aset. Nilai-nilai budaya, tradisi-tradisi dan upacara-upacara ritual dapat menjadi sumber daya atau aset yang penting untuk membangun perdamaian.
 - 10) Melakukan usaha-usaha inovatif dan kreatif. Membangun perdamaian menggunakan banyak cara untuk menjalin komunikasi dan dialog guna mengembangkan solusi-solusi yang kreatif terhadap persoalan-persoalan kompleks.

Penutup: Seni Mendesain Perdamaian

Mendesain perdamaian di tengah masyarakat yang bertikai merupakan sebuah seni. Sebagaimana halnya seni-seni yang lain, seperti seni lukis atau

seni ukir, seni mendesain perdamaian dalam masyarakat bertikai dapat dipelajari dan dibudayakan. Membangun perdamaian mengandaikan dan membutuhkan imajinasi, skill organisasional dan manajerial, kepemimpinan dan strategi. Berbeda dengan para seniman untuk seni lukis atau seni pahat yang lebih banyak bekerja secara individual, seniman dan arsitek perdamaian membutuhkan kerjasama dan saling kebergantungan satu dengan yang lain baik orang perorangan maupun secara kolektif, baik komunitas lokal, regional, nasional maupun internasional, baik kelompok insider maupun outsider. Hal ini mempunyai konsekuensi pada sikap respek satu terhadap yang lain dan pengakuan yang jujur terhadap kontribusi dan peran banyak aktor membangun perdamaian.

* * * * *

DAFTAR PUSTAKA

Berger, Peter. *The Sacred Canopy: Elements of a Sociology Theory of Religion* New York: Garden City, 1967.

Lederach, John Paul. *The Moral Imagination. The Art and Soul of Building Peace*. New York: Oxford University Press, 2005.

_____. *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Society*. U.S. Institute of Peace, 1997.

Sirch, Lisa. *The Little Book of Strategic Peacebuilding*. Pennsylvania: Good Books, 200.